

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Pada umumnya, setiap negara di dunia termasuk Indonesia memiliki tujuan yang sama yaitu meningkatkan taraf hidup atau kesejahteraan seluruh rakyatnya melalui peningkatan pembangunan ekonomi suatu negara. Pembangunan ekonomi merupakan suatu proses untuk mengembangkan kegiatan ekonomi di suatu negara, yang menyebabkan pendapatan perkapita meningkat sehingga tercapai tingkat kemakmuran yang tinggi. Dalam rangka guna mewujudkan pembangunan nasional agar tepat sasaran, maka pembangunan di daerah-daerah perlu di arahkan pada pengembangan daerah. Pembangunan yang terdapat di daerah perlu di sesuaikan dengan potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah, selain itu setiap daerah di tuntut untuk dapat mengelola kemampuan daerahnya terutama di daerah tertinggal (Wulandari, 2016).

Akan tetapi permasalahan pembangunan ekonomi masih belum dapat terhindarkan baik pada negara maju dan juga seringkali terjadi pada negara berkembang yang menjadi permasalahan pokok dalam pembangunan (Damanik dkk., 2018). Salah satu permasalahan dalam pembangunan ekonomi yaitu ketimpangan distribusi pendapatan. Dimana pendapatan yang diterima oleh masyarakat masih cenderung belum merata sehingga menciptakan celah diantaranya. Apabila hal yang demikian terjadi berlarutlarut maka akan memicu permasalahan lain seperti

kemiskinan, kecemburuan sosial antar masyarakat yang akan juga memicu tindakan kriminalitas.

Kebijakan otonomi yang diberlakukan sejak tahun 2001 yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 merupakan upaya pemerintah meminimalisir adanya ketimpangan. Harapan pemerintah bahwa melalui kebijakan tersebut wilayah kecil mampu mengelola sumber dayanya secara mandiri dan terdisintegrasikan dengan wilayah lainnya. Suyanto (2017) menyatakan sejak pemberlakuan Undang-Undang No.22 Tahun 1999 besarnya ketimpangan terlihat semakin tinggi untuk pemerintah kabupaten/kota di Indonesia (BPS, 2016).

Faktor-faktor penyebab terjadinya ketimpangan distribusi pendapatan seperti yang disampaikan oleh Damanik dkk. (2018) antara lain : (1) Perkembangan penduduk yang cenderung terus meningkat yang diikuti dengan turunnya pendapatan per kapita. (2) Pertumbuhan produksi barang yang bernilai tetap namun terjadi inflasi pada pendapatan masyarakat. (3) Tidak meratanya pembangunan antar daerah satu dengan daerah lainnya. (4) Investasi pada proyek padat modal yang mengakibatkan besaran pendapatan modal lebih besar dibanding besaran pendapatan modal kerja yang berakibat pada meningkatnya angka pengangguran cenderung. (5) rendahnya mobilitas sosial. (6) meningkatnya harga produk industri akibat program. (7) Menurunnya nilai tukar. (8) Menurunnya produksi industri kecil.

Fenomena ketimpangan pendapatan pada suatu daerah memang sudah menjadi hal yang biasa dalam perkembangan suatu daerah. Ketimpangan tersebut tidak hanya terjadi pada lingkup negara, bahkan sampai pada daerah provinsi atau unit yang lebih

rendah begitupula di provinsi Sumatera Selatan. Ketimpangan sering menjadi permasalahan yang serius bagi setiap daerah karena berpotensi menimbulkan konflik finansial, sosial, atau hubungan yang saling memperlemah antar daerah. Salah satu indikator yang digunakan melihat ketimpangan pendapatan adalah indeks gini terutama di provinsi Sumatera Selatan.

Dalam mengukur ketimpangan pendapatan menurut BPS (2016) yang terjadi antar masyarakat dapat dilihat menggunakan indeks gini (gini rasio). Mengukur ketimpangan dengan menggunakan indeks gini berbeda dengan indeks theil. Kisaran angka dalam indeks gini yaitu antara 0 sampai 1. Apabila angka indeks gini mendekati angka 0 menandakan bahwa ketimpangan pendapatan yang terjadi antar masyarakat semakin rendah (merata) namun ketika mendekati 1 menandakan bahwa ketimpangan pendapatan yang terjadi antar masyarakat semakin tinggi (melebar). Sedangkan indeks theil menurut Aminah (2017) merupakan indeks yang digunakan untuk menganalisis distribusi spasial. Dengan indeks theil dapat diketahui sumber ketimpangan pembangunannya baik antar wilayah pembangunan (*between*) maupun dalam wilayah pembangunan (*within*). Indeks ini merupakan indeks ketimpangan yang jarang di gunakan dan indeks theil kurang populer daripada koefisien gini.

Ketidakmerataan pembangunan yang hanya terpusat, dapat menguatkan ketimpangan pendapatan yang terjadi di setiap provinsi di Indonesia. Setiap daerah provinsi memiliki ketimpangan pendapatan yang tidak sama dengan daerah lain. Dari 10 provinsi di pulau Sumatera dengan ketimpangan tertinggi terjadi pada provinsi Sumatera Selatan. Berikut data gini ratio provinsi di pulau Sumatera tahun 2017-2021:

<b>PROVINSI</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
ACEH	0.329	0.318	0.321	0.319	0.323
SUMATERA UTARA	0.335	0.311	0.315	0.314	0.313
SUMATERA BARAT	0.312	0.305	0.307	0.301	0.300
RIAU	0.325	0.347	0.331	0.321	0.327
JAMBI	0.334	0.335	0.324	0.316	0.315
<b>SUMATERA SELATAN</b>	<b>0.365</b>	<b>0.341</b>	<b>0.339</b>	<b>0.338</b>	<b>0.340</b>
BENGKULU	0.349	0.355	0.329	0.323	0.321
LAMPUNG	0.333	0.326	0.331	0.320	0.314
KEP. BANGKA BELITUNG	0.276	0.272	0.262	0.257	0.247
KEP. RIAU	0.359	0.339	0.337	0.334	0.339
<b>INDONESIA</b>	<b>0.391</b>	<b>0.384</b>	<b>0.380</b>	<b>0.385</b>	<b>0.381</b>

Sumber : Badan Pusat Statistik

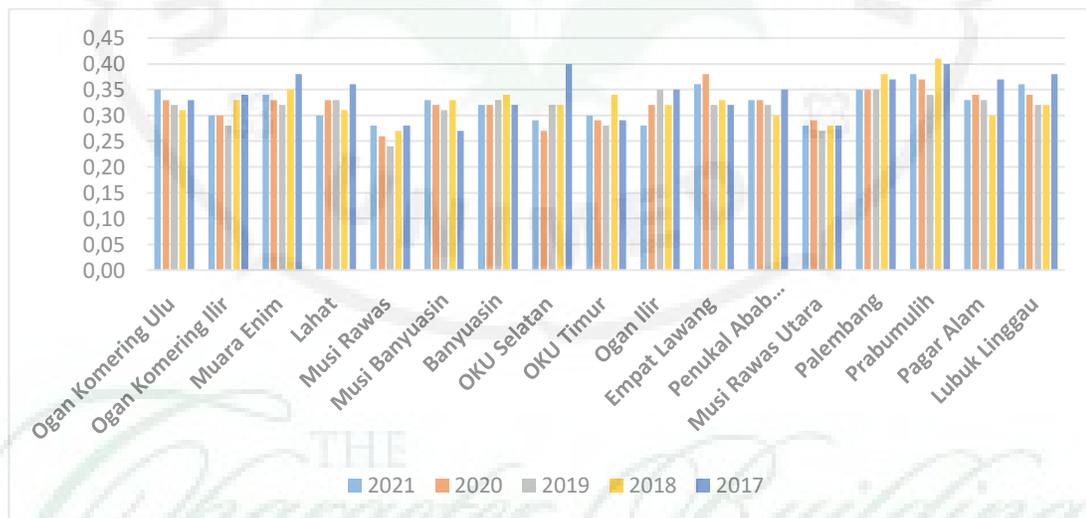
**Tabel 1.1. Gini Ratio Menurut Provinsi di Pulau Sumatera Tahun 2017-2021 (persen)**

Bedasarkan Tabel 1.1. Ketimpangan Distribusi Pendapatan di Pulau Sumatera pada tahun 2017-2021 yang diukur dengan menggunakan indeks gini, menunjukkan ketimpangan pendapatan tertinggi terdapat pada provinsi di Sumatera Selatan. Sumatera Selatan merupakan provinsi yang perekonomiannya masih mengandalkan komoditas perkebunan dan pertambangan, yakni karet, kelapa sawit dan batu bara. Perbedaan karakteristik antar daerah pada provinsi Sumatera Selatan merupakan penyebab tingginya ketimpangan pendapatan pada provinsi ini.

Data di atas menunjukkan bahwa ketimpangan atau disparitas antara masyarakat dan wilayah di Sumatera Selatan yang diukur dengan rasio gini mencapai rata-rata 0.34 persen yang masuk dalam kategori jenis ketimpangan sedang. Provinsi Sumatera Selatan memiliki tingkat gini rasio yang bersifat fluktuatif dengan tren naik turun dalam indeks gini. Hal ini dapat mengarah pada kesimpulan bahwa ada ketimpangan

sedang dalam pendapatan di Sumatera Selatan dan membuktikan bahwa pertumbuhan ekonomi belum dikatakan sepenuhnya merata ke seluruh masyarakat yang ada di provinsi Sumatera Selatan atau dapat dikatakan timpang.

Provinsi yang mempunyai pengaruh kuat akan terciptanya pola pembangunan ekonomi di suatu wilayah. Ketidakmerataan ini berpengaruh pada kemampuan untuk tumbuh suatu wilayah yang mengakibatkan beberapa wilayah mampu tumbuh dengan cepat sementara wilayah lainnya tumbuh lambat. Kemampuan tumbuh ini akan menyebabkan terjadinya ketimpangan baik pembangunan maupun pendapatan antar daerah. Berikut data gini ratio Kabupaten / Kota yang ada di Sumatera Selatan.



Sumber : Badan Pusat Statistik

**Gambar 1.1. Gini Ratio Kabupaten / Kota di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017 – 2021 (Persen)**

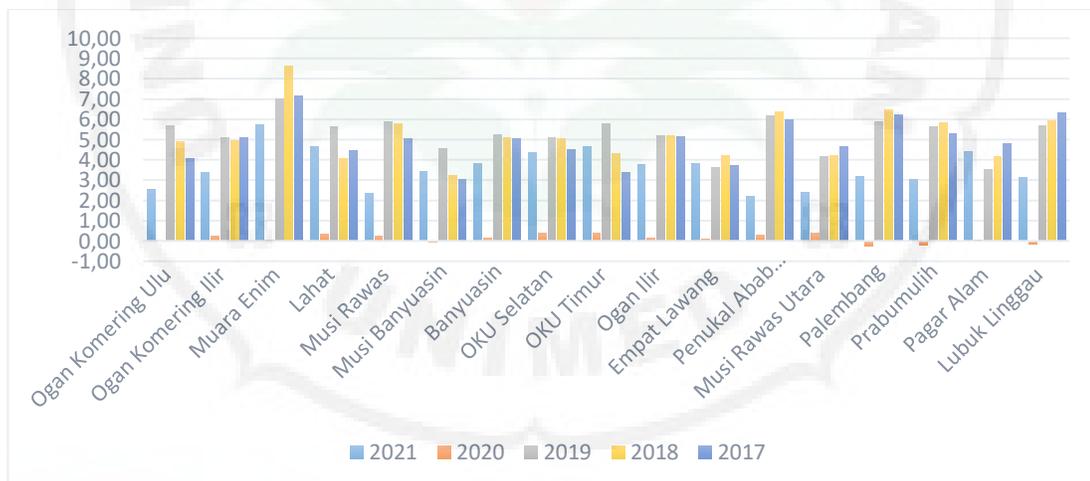
Pada grafik 1.1. di atas, gini ratio setiap kabupaten/kota di Sumatera Selatan setiap tahunnya mengalami fluktuasi. Daerah yang memiliki angka gini ratio tertinggi di Provinsi Sumatera Selatan periode 2017-2021 terletak pada kota Prabumulih yang

mencapai mencapai 0.414. Hal ini disebabkan karena Kota Prabumulih merupakan kota penghasil ribuan barel minyak bumi dan jutaan meter kubik gas setiap tahunnya. Sedangkan daerah yang memiliki angka gini ratio terendah di Provinsi Sumatera Selatan adalah kabupaten Musi Rawas sebesar 0.239. Hal ini disebabkan karena kabupaten Musi Rawas masih mengandalkan komoditas pertanian seperti beras, jagung, dan kedelai. Ini sesuai dengan pernyataan Todaro (2011) ketimpangan pendapatan cenderung lebih tinggi pada daerah dengan sektor industri modern daripada suatu daerah yang menggunakan sektor pertanian yang relatif tetap.

Ketimpangan ekonomi memiliki dampak positif dan negatif. Efek positif dari ketimpangan adalah dapat mendorong persaingan antar daerah tertinggal untuk mendorong pertumbuhan dan kesejahteraan di daerahnya. Sementara dampak negatif ketimpangan adalah ketidakefisienan ekonomi yang menggerogoti stabilitas sosial dan solidaritas, inefisiensi ekonomi, serta tingkat ketimpangan yang tinggi sering dianggap tidak adil dan akan membawa masalah baru bagi pembangunan kesejahteraan sosial masyarakat (Todaro, 2011).

Berdasarkan teori Todaro & Smith, (2003) faktor-faktor ketimpangan pendapatan atau gini ratio di Sumatera Selatan di pengaruhi oleh beberapa faktor yaitu pertumbuhan ekonomi, indeks pembangunan manusia dan tingkat partisipasi angkatan kerja. Dalam pembangunan, pertumbuhan ekonomi seringkali menjadi alat ukur apakah pembangunan yang dilakukan selama ini berhasil atau tidak. Meskipun masih ada indikator lain untuk mengukur keberhasilan, namun pertumbuhan ekonomi juga memiliki andil yang besar dalam keberhasilan sebuah pembangunan ekonomi. Salah

satu ukuran dari keberhasilan pembangunan ekonomi dapat dilihat dengan pertumbuhan ekonomi daerah tersebut. Menurut Boediono, (2013) pertumbuhan ekonomi didefinisikan sebagai hasil dari proses pembangunan ekonomi yang berbentuk output perkapita jangka panjang. Maksudnya, pertumbuhan ekonomi merupakan hasil yang akan didapatkan ketika suatu negara melakukan pembangunan, hasil yang didapatkan dari proses pembangunan tersebut ialah output yang berjangka panjang. Laju pertumbuhan ekonomi di provinsi Sumatera Selatan dapat dilihat pada gambar berikut:



Sumber : Badan Pusat Statistik

**Gambar 1.2. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan Tahun 2017 -2021 (persen)**

Pada gambar 1.2. di atas dapat dilihat bahwa laju pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Sumatera Selatan mengalami fluktuasi atau dalam kata lain naik/turun. Gambar di atas menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi tertinggi terletak pada kabupaten Muara Enim, dimana pada tahun 2017 kabupaten Muara Enim mencapai 7.16, kemudian kota Palembang dimana pada tahun 2018 laju pertumbuhan

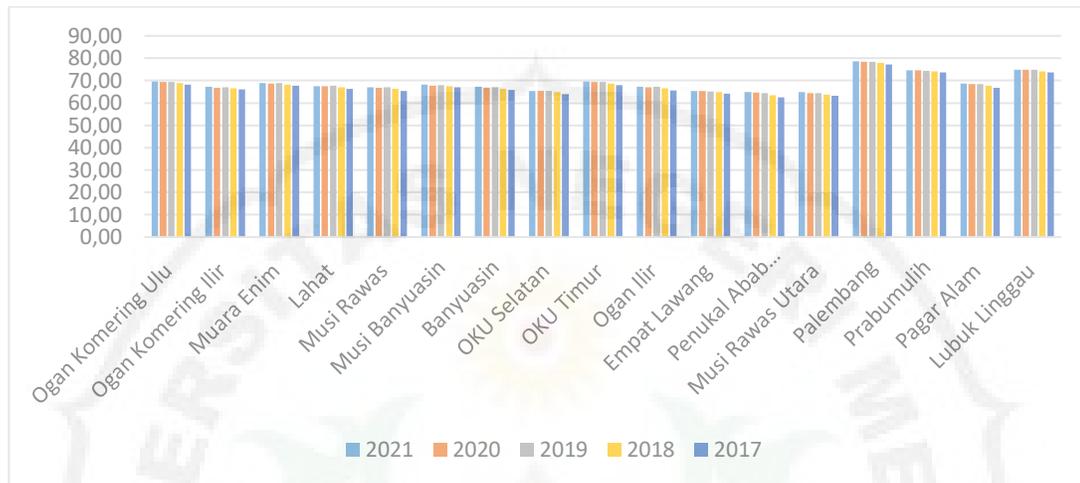
ekonomi mencapai 6.48 akan tetapi kota Palembang juga mengalami laju pertumbuhan ekonomi terendah bahkan paling rendah di banding kabupaten/kota di Sumatera Selatan yaitu pada tahun 2020 yang mencapai -0.27, kemudian diikuti kota prabumulih yang angkanya mencapai -0.18 di tahun 2020.

Laju Pertumbuhan Ekonomi yang terjadi pada tahun 2020 di sebabkan karena wabah Covid-19 yang mengakibatkan banyak sektor - sektor ekonomi mengalami kerugian bahkan ada yang sampai gulung tikar, oleh karena itu angka pertumbuhan ekonomi yang terjadi pada kabupaten/kota di Sumatera Selatan pada tahun 2020 turun drastis bahkan ada beberapa kabupaten/kota yang angkanya minus. Akan Tetapi penurunan ini mulai stabil kembali pada tahun 2021 yang di akibatkan beberapa sektor-sektor ekonomi mulai bangkit kembali. Menurut Todaro & Smith (2003) peningkatan pertumbuhan ekonomi akan meningkatkan ketimpangan pendapatan dan sebaliknya. Akan tetapi di kabupaten OKU Timur pada tahun 2018 tidak demikian, dimana penurunan pertumbuhan ekonomi di bandingkan tahun sebelumnya menyebabkan ketimpangan pendapatan malah mengalami peningkatan dari 0.276 menjadi 0.336, dimana kriteria ketimpangan pendapatan mengalami perubahan dari ketimpangan rendah ke ketimpangan sedang. Ini tidak sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa penurunan pertumbuhan ekonomi akan menurunkan ketimpangan pendapatan.

Penelitian yang mengkaji antara pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan sudah sering di teliti sebelumnya. Seperti yang di lakukan oleh Putri dkk. (2015), dan Kiak (2020) dalam penelitiannya menunjukkan hasil bahwa variabel pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh positif terhadap ketimpangan distribusi

pendapatan. Namun hal ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Arafah (2022), dan Febriyani & Anis, (2021) yang menunjukkan hasil bahwa variabel pertumbuhan ekonomi menunjukkan hasil tidak terdapat pengaruh pertumbuhan ekonomi dengan ketimpangan pendapatan. Tentunya *research gap* ini menjadi kajian yang menarik untuk mengungkap lebih lanjut pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan pendapatan di kabupaten/kota di Sumatera Selatan.

Selain pertumbuhan ekonomi, IPM juga mempengaruhi ketimpangan pendapatan di Sumatera Selatan. Tingkat IPM yang berbeda di setiap daerah membuat IPM dapat dijadikan salah satu faktor yang mempengaruhi ketimpangan (Pradnyadewi & Purbadharmaja, 2017). Semakin tinggi IPM maka semakin tinggi produktivitas penduduk sehingga tingkat pendapatan akan semakin tinggi, sebaliknya jika IPM rendah maka produktivitas akan rendah dan akan berpengaruh pada pendapatan. Nilai IPM di setiap Kabupaten/Kota menunjukkan nilai yang cenderung tinggi dan Kota Palembang menjadi yang tertinggi diantara Kabupaten/Kota lain di Provinsi Sumatera Selatan. Nilai IPM dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang berarti kualitas masyarakat dan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Sumatera Selatan semakin membaik. Berikut data IPM Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017-2021:



Sumber : Badan Pusat Statistik

**Gambar 1.3. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan Tahun 2017 – 2021**

Pada gambar 1.3. di atas menunjukkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera selatan setiap tahunnya mengalami kenaikan. Dalam pengukuran tinggi rendahnya IPM ada 3 yaitu ketika indeks pembangunan manusia  $> 80$  maka termasuk sangat tinggi, indeks pembangunan manusia antara 70-80 maka termasuk tinggi dan indeks pembangunan manusia antara 60-70 maka termasuk sedang. Jika di lihat pada gambar di atas angka IPM tertinggi yaitu pada kota Palembang yang di mana pada tahun 2021 IPM Kota Palembang mencapai 78.72 dari sebelumnya yang hanya sebesar 77.22 pada tahun 2017. Sedangkan IPM terendah jatuh pada kabupaten Panukal Abab Lamatang Ilir yaitu pada tahun 2021 sebesar 64.88 dari sebelumnya yang hanya 62.58.

IPM yang tidak merata antar daerah menyebabkan perbedaan dalam kualitas sumber daya manusia. Dalam pernyataan Hartini (2017) Dimana semakin rendah IPM maka tingkat produktivitas penduduk juga akan rendah kemudian produktivitas yang

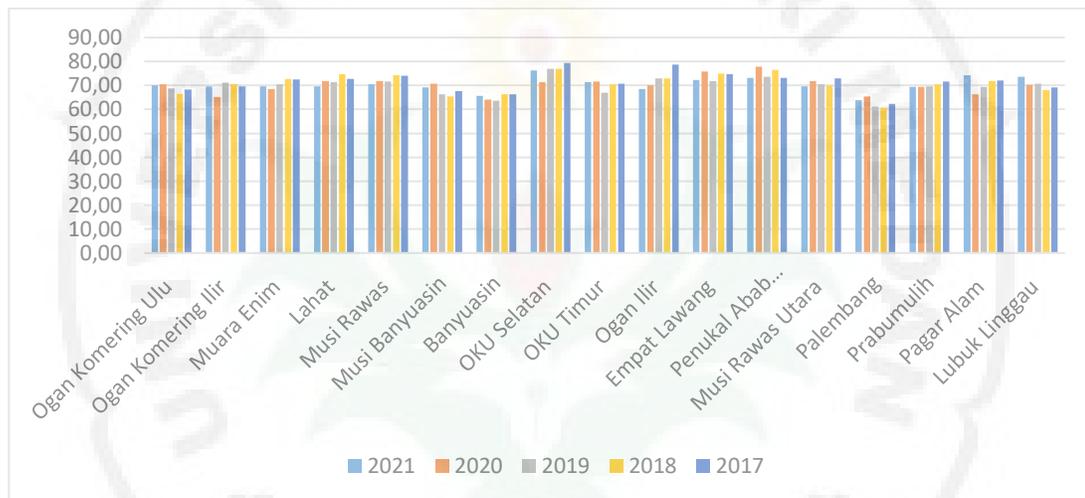
rendah akan berpengaruh pada rendahnya pendapatan, begitu pula sebaliknya semakin tinggi IPM akan semakin tinggi tingkat produktivitas penduduk yang kemudian mendorong tingkat pendapatan menjadi semakin tinggi.

Seperti yang dikemukakan oleh Becker and Posner (2007) yang menyatakan bahwa IPM berpengaruh negatif terhadap ketimpangan, artinya peningkatan indeks pembangunan manusia akan menurunkan ketimpangan pendapatan. Akan tetapi beberapa kabupaten di atas salah satunya di kabupaten Empat Lawang pada tahun 2020 tidak terjadi demikian, dimana kenaikan Indeks pembangunan manusia menyebabkan ketimpangan pendapatan mengalami kenaikan juga. Dapat di lihat pada gambar 1.1. menunjukkan angka gini ratio di kabupaten Empat Lawang tahun 2020 sebesar 0.380 yang tadinya di tahun 2019 sebesar 0.318.

Penelitian yang mengkaji antara indeks pembangunan manusia dan ketimpangan pendapatan sudah sering di teliti sebelumnya. Seperti yang di lakukan oleh Arafah (2022), Fatika (2022) yang menunjukkan hasil variabel indeks pembangunan manusia tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan. Namun hal ini tidak sejalan dengan penelitian yang di lakukan Harahap (2022), Putri dkk. (2015) yang menunjukkan hasil bahwa variabel IPM berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Tentunya *research gap* ini menjadi kajian yang menarik untuk mengungkap lebih lanjut pengaruh IPM terhadap ketimpangan pendapatan di kabupaten/kota di Sumatera Selatan.

Secara umum ketimpangan distribusi pendapatan juga di pengaruhi oleh kondisi geografis, naik turunnya sektor sumber daya manusia serta ketenagakerjaan. Dengan

meningkatkan kualitas di sektor sumber daya manusia yang di gambarkan dengan TPAK diharapkan dapat mengurangi nilai ketimpangan distribusi pendapatan yang terjadi. Berikut data Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Sumber : Badan Pusat Statistik

**Gambar 1.4. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan Tahun 2017 – 2021**

Dari gambar 1.4. di atas menunjukkan bahwa Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan setiap tahunnya mengalami fluktuasi. Dimana angka tingkat partisipasi angkatan kerja terendah terletak pada Kota Palembang dan kabupaten Banyuasin, yang dimana TPAK kota Palembang pada tahun 2018 sebesar 60.71, dan TPAK kabupaten Banyuasin pada tahun 2019 sebesar 63.53. Sedangkan tingkat partisipasi angkatan kerja tertinggi terletak pada Kabupaten Oku Selatan, kabupaten Ogan Ilir, dan kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir. Dimana pada tahun 2017 kabupaten Oku Selatan angkanya mencapai 79.41, kemudian di ikuti

kabupaten Ogan Ilir pada tahun 2017 angkanya sebesar 78.62, dan kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir pada tahun 2020 sebesar 77.70.

Berdasarkan teori Solow (1956) yang mengemukakan bahwa kombinasi antara jumlah modal dan tenaga kerja yang digunakan akan menghasilkan tingkat output yang berbeda dan tingkat efisiensi yang berbeda pula. Tingkat partisipasi angkatan kerja adalah salah satu faktor yang mempengaruhi besaran output suatu kegiatan perekonomian, sehingga semakin banyak masyarakat yang produktif, maka akan menghasilkan output yang tinggi pula yang mempengaruhi PDRB begitupun pada pendapatan perkapita, meningkatnya tingkat partisipasi angkatan kerja di suatu daerah. Teori ini sejalan dengan penelitian Rahma (2018) yang menunjukkan hasil bahwa variabel TPAK berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Akan tetapi di kabupaten Ogan Komering Ilir pada tahun 2020 tidak demikian, dimana penurunan tingkat partisipasi angkatan kerja di bandingkan tahun sebelumnya menyebabkan ketimpangan pendapatan malah mengalami peningkatan dari 0.280 menjadi 0.302 dimana kriteria ketimpangan pendapatan mengalami perubahan dari ketimpangan rendah ke ketimpangan sedang.

Penelitian yang mengkaji antara tingkat partisipasi angkatan kerja dan ketimpangan pendapatan sudah sering di teliti sebelumnya. Seperti yang di lakukan oleh Rahma (2018), dan Astuti & Hukom (2023) yang menunjukkan hasil bahwa variabel TPAK berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Namun hal ini tidak sejalan dengan penelitian yang di lakukan Wijayanti (2023), Nengsih (2023) dan Nilasari (2022) yang menunjukkan hasil bahwa variabel

tingkat partisipasi angkatan kerja memiliki arah hubungan negatif dan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan. Tentunya *research gap* ini menjadi kajian yang menarik untuk mengungkap lebih lanjut pengaruh tingkat partisipasi angkatan kerja terhadap ketimpangan pendapatan di kabupaten/kota di Sumatera Selatan.

Tentunya, masalah ketimpangan perlu segera diatasi karena ketimpangan yang ekstrim dapat mengakibatkan terjadinya inefisiensi ekonomi, melemahnya stabilitas sosial dan solidaritas, serta ketimpangan yang tinggi pada umumnya dipandang tidak adil (Todaro & Smith, 2003). Selain itu, adanya ketimpangan juga menunjukkan belum tercapainya salah satu tujuan berbangsa dan bernegara yaitu terwujudnya pemerataan pembangunan dan kesejahteraan untuk seluruh masyarakatnya. Oleh karena itu berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik untuk mengkaji lebih mendalam terkait **“Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ketimpangan Pendapatan Di Sumatera Selatan”**.

## **1.2. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan penjelasan dalam latar belakang di atas, ditemukan masalah-masalah yang dapat diidentifikasi berikut:

1. Ketimpangan Pendapatan kabupaten/kota di Sumatera Selatan pada tahun 2017-2021 mengalami fluktuasi dan merupakan ketimpangan yang tertinggi di antara provinsi lain di pulau sumatra.

2. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) juga mengalami fluktuasi, ini membuktikan bahwa pertumbuhan ekonomi belum dikatakan sepenuhnya merata ke seluruh masyarakat yang ada di Provinsi Sumatera Selatan atau dapat dikatakan timpang.
3. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang mengalami kenaikan setiap tahunnya yang menandakan produktivitas penduduk mengalami peningkatan tetapi tidak di ikuti dengan ketimpangan pendapatan yang masih mengalami fluktuasi.
4. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) mengalami fluktuasi yang menggambarkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan di Sumatera Selatan masi belum stabil.

### **1.3. Pembatasan Masalah**

Tujuan adanya pembatasan masalah yaitu agar penelitian yang dilakukan tidak meluas yang menyebabkan kesulitan dalam pemahaman yang sudah disesuaikan dengan tujuan adanya proposal ini. Sehingga perlu adanya pembatasan masalah yaitu :

1. Penelitian ini menggunakan variabel dependen Ketimpangan Pendapatan yang diukur dengan menggunakan Indeks Gini di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2017-2021.
2. Penelitian ini menggunakan variabel independen yaitu Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE), Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2017-2021.
3. Penelitian ini mengambil objek 17 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.

#### **1.4. Rumusan Masalah**

Berdasarkan identifikasi uraian diatas, maka peneliti merumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh Laju Pertumbuhan Ekonomi terhadap Ketimpangan Pendapatan di Provinsi Sumatera Selatan?
2. Bagaimana pengaruh Indek Pembangunan Manusia terhadap Ketimpangan Pendapatan di Provinsi Sumatera Selatan?
3. Bagaimana pengaruh Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja terhadap Ketimpangan Pendapatan di Provinsi Sumatera Selatan?
4. Bagaimana pengaruh Laju Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia, dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja terhadap Ketimpangan Pendapatan di Provinsi Sumatera Selatan?

#### **1.5. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka tujuan peneliti melakukan penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) terhadap Ketimpangan Pendapatan di Provinsi Sumatera Selatan.
2. Untuk mengetahui pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap ketimpangan Pendapatan di Provinsi Sumatera Selatan.
3. Untuk mengetahui pengaruh Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) terhadap Ketimpangan Pendapatan di Provinsi Sumatera Selatan.

4. Untuk mengetahui pengaruh Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE), Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) terhadap Ketimpangan Pendapatan di Provinsi Sumatera Selatan.

### **1.6. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi beberapa pihak. Berikut manfaat yang diharapkan oleh penulis :

1. Bagi pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pihak-pihak seperti pemerintah Provinsi maupun pemerintah Kabupaten/Kota untuk membuat kebijakan atau aturan dengan tujuan mengatasi masalah ketimpangan pendapatan.

2. Bagi penulis

Hasil penelitian ini di harapkan mampu memberikan pengetahuan serta wawasan lebih mengenai faktor apa saja yang mempengaruhi ketimpangan pendapatan.

3. Bagi pihak lain

Penelitian ini di harapkan bisa menjadi bahan studi lebih lanjut bagi kalangan akademis yang melakukan penelitian dengan tema yang sama.